



Prosiding Seminar Nasional

Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Kamis, 6 Oktober 2016

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jamaris, dkk

ISBN 978-602-60486-0-8

Diterbitkan oleh:
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang



KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

Padang, 6 Oktober 2016

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**DITERBITKAN OLEH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Padang, 6 Oktober 2016**

**DITERBITKAN OLEH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan Luar Sekolah 2016
Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Penulis, Jamaris, dkk.
Editor, Syafruddin Wahid
Padang, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (2016)
x & 257 hlm; 15,5 x 23 cm

Copyright@2016
by Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Cetakan pertama, Oktober 2016

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar,
Air Tawar Barat, Padang Utara, Padang
Sumatera Barat

ISBN 978-602-60486-0-8

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga prosiding hasil Seminar Nasional Pendidikan Luar Sekolah 2016 dapat terselesaikan.

Target pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh komponen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat desa. Terkait itu, pemerintah melalui Kementerian Desa PDT mengonsep adanya tenaga pendamping desa. Pendampingan Desa merupakan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi pendampingan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar masyarakat (*community learning process*).

Para tenaga pendamping profesional bertugas untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan UU tentang Desa dan mendampingi masyarakat dalam peningkatan daya tawar untuk mengakses sumberdaya lokal yang dibutuhkan demi kepentingan pembangunan. Pendampingan dilakukan sebagai proses penguatan (*empowering society*) sebagai masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (*self governing community*), dan bukan berbasis pada mobilisasi partisipasi masyarakat yang lebih bersifat *top down*.

Demi upaya mewujudkan desa sebagai *self governing community*, para tenaga profesional Pendamping Desa diarahkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk mampu mengorganisir dan mengkonsolidasikan seluruh potensi yang selanjutnya akan direkrut, dilatih dan dibentuk menjadi kader-kader desa.

Prosiding ini disusun sebagai tindak lanjut kegiatan seminar yang telah dilaksanakan pada Oktober 2016. Seminar diikuti oleh peserta baik peneliti, dosen, praktisi maupun pemerhati pendidikan. Partisipasi aktif dari semua stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada sinergi kinerja di bidang pendidikan luar sekolah. Semua makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui peer review.

Materi prosiding dikelompokkan berdasarkan bidang kajian. Pengelompokkan berdasarkan bidang ini mungkin tidak dapat dilakukan secara tepat karena keterkaitan antar bidang ilmu dalam beberapa makalah, namun redaksi mengelompokkan berdasarkan dominasi kandungannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar dan penyusunan prosiding ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pembangunan pendidikan luar sekolah di Indonesia.

Padang, Oktober 2016
Redaksi

DAFTAR ISI

PENYIAPAN SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI TENAGA PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

- 1. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSI
PENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA** oleh
Jamaris (Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri
Padang) 1
- 2. SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN
PEMBANGUNAN NAGARI** oleh Syafruddin Wahid (Dosen
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang) 17
- 3. PERAN STRATEGIS SARJANA PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH DALAM Mendukung PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA** oleh Ismaniar (Dosen Jurusan
Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Padang) 42
- 4. PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh
Alim Harun Pamungkas (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 51

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

- 5. PENGUATAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA** oleh Syur'aini
(Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang) 63
- 6. PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
KOMPETENSI PENDAMPING PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA** oleh Dayat Hidayat (Dosen Program
Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Singaperbangsa
Karawang) 73
- 7. PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL** 88

BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN oleh Wirdatul Aini (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	
8. PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYA PENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PROGRAM PENDAMPINGAN DESA oleh Muhaimin (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang)	97
9. PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN oleh Iswandi (Dosen STKIP YPM Bangko Jambi)	105
10. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI MASYARAKAT DESA oleh Elfi Rahmi (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas)	116
PRESPEKTIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	
11. MEMAHAMI MASYARAKAT SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL oleh Setiawati (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	125
12. SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKAN <i>SELF GOVERNING COMMUNITY</i> DI SUMATERA BARAT oleh MHD. Natsir (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	135
13. PROCESSING WASTE INTO ORGANIC FERTILIZER FOR THE GROUP OF FARMERS IN BLOOMING SAIYO KENEGARIAN TANJUNG BALIT THE DISTRICT X KOTO DISTRICT SOLOK oleh Siti Farida F & Mas'ula (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	144

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

14. **PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL AGEN PERUBAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KASUS DESA PALEM KAB. KEDIRI DAN DUSUN BAJULMATI KAB. MALANG)** oleh Zulkarnain (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang) 150
15. **PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAH SATU MITIGASI BENCANA** oleh Vevi Sunarti (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 166
16. **PERAN PENDAMPING DESA DALAM RELOKASI KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG** oleh Mahfuzi Irwan (Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta) 183
17. **PENDAMPING DESA SEBAGAI PENGGERAK PEMBERDAYAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** oleh Marta Dwi Ningrum (Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta) 198

KOMPETENSI TENAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18. **URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR DALAM PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh Tasril Bartin (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 210
19. **PEMUDA SEBAGAI FASILITATOR PENDAMPING DESA** oleh Syamsuddin (Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Nonfomal Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta) 225

KONSEP PEMBELAJARAN

20. PERAN GURU PROFESIONAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN oleh Darnis Arief (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)	238
--	-----

PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Alim Harun Pamungkas

Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

082230294393/pamungkasd527@gmail.com

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN), secara umum memiliki dua pendekatan utama, yaitu: KKN berpendekatan tematik dan KKN berpendekatan mandiri. Dalam KKN berpendekatan tematik, universitas menetapkan tema yang mencerminkan bidang, tujuan dan sasaran seluruh program kerja yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa KKN. Dalam KKN berpendekatan mandiri, universitas memberikan kebebasan kepada kelompok mahasiswa KKN untuk mengembangkan dan melaksanakan program kerja berdasarkan hasil asesmen masalah dan atau kebutuhan masyarakat sasaran.

KKN berpendekatan tematik bertujuan membentuk, membina, dan mengembangkan pemberdayaan keluarga sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi manusia dan alam setempat. Dari sudut masyarakat penerima, KKN berpendekatan tematik membantu masyarakat dalam membentuk, mengisi dan mengembangkan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa secara sistematis. Lembaga pemberdayaan desa dibentuk sebagai wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, KB (Keluarga Berencana) dan kesehatan, serta lingkungan. Secara keseluruhan, semua upaya tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki mutu manusia, misalnya seperti pengukuran berdasar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau pencapaian tujuan dan sasaran SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Kendati ada perbedaan dalam proses penetapan tema, pada KKN berpendekatan tematik sudah dipastikan, sedangkan pada KKN mandiri ditetapkan oleh kelompok mahasiswa KKN. Pada dasarnya kedua pendekatan ini menerapkan tahapan pengembangan program

kerja dan metode pemberdayaan masyarakat yang sama. Titik-tolak suatu program senantiasa adalah permasalahan yang dihadapi, atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai khalayak sasaran. Selanjutnya, karena fungsi utama kelompok mahasiswa KKN, baik dalam KKN berpendekatan tematik, maupun KKN berpendekatan mandiri adalah sebagai duta dan/atau mitra perubahan (*agents of change*), duta dan/atau mitra pembangunan (*agents of development*), atau duta dan/atau mitra pemberdayaan (*agents of empowerment*), maka, metode kerja mereka dalam menjalankan peran pun pada dasarnya sama. Karena itu, uraian tentang pengembangan program, tipologi program dan ragam metode pendidikan untuk pemberdayaan keluarga dan masyarakat, bisa diterapkan, baik untuk KKN berpendekatan tematik maupun KKN berpendekatan mandiri.

B. PEMBAHASAN

1. Selintas Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Secara sosiologik, perguruan tinggi senantiasa memiliki sekurang-kurangnya tiga jati diri. Pertama, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan akademik dan atau profesional, baik jenjang diploma, sarjana, magister, maupun doktor. Karena itu, tolok ukur pertama penilaian atas sebuah perguruan tinggi tentu saja adalah kelayakan dharma pendidikan atau pengajaran.

Kedua, perguruan tinggi juga niscaya merupakan sebuah lembaga akademik yang berperan mengembangkan dan menyebarkan ilmu, teknologi dan seni, sesuai dengan bidang-bidang keilmuan, teknologi dan kesenian yang ditekuni. Karena itu, tolok ukur kedua penilaian atas sebuah perguruan tinggi tentu saja adalah kelayakan dharma penelitian, yang termasuk di dalamnya adalah penerbitan karya ilmiah oleh para akademisi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ketiga, perguruan tinggi juga niscaya merupakan lembaga sosial yang tidak bisa lepas dari tanggungjawab untuk peran serta (*participation*) meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena itu, tolok ukur ketiga penilaian atas sebuah perguruan tinggi adalah kelayakan dharma pengabdian pada masyarakat, yang termasuk di dalamnya adalah melalui program kerja Kuliah Kerja Nyata para mahasiswa. Konsep peranserta itu sendiri, harus dipandang sebagai konsekuensi logik dari kesadaran bahwa lembaga dan warga perguruan tinggi (*civitas academica*) merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat

(*part of the whole community*), yang karena itu harus ikut ambil (*take parts*) bagian dalam perbaikan dari keseluruhan.

Pada tingkat mahasiswa, turunan (*derivation*) dari tinjauan sosiologik kelembagaan tersebut adalah bahwa: (1) dharma pertama seorang mahasiswa adalah belajar, mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya, (2) dharma kedua seorang mahasiswa adalah bergiat dalam penalaran, kajian dan penelitian, termasuk menulis karya akademik, dan (3) dharma ketiga seorang mahasiswa adalah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara terprogram dan melembaga.

KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang dapat diwajibkan untuk jenjang sarjana pada tingkat tertentu, yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan pelayanan masyarakat. KKN merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, tata kerja, dan persyaratan tertentu. Karena itu, KKN juga diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik dengan dunia praktik atau antara dunia teoretik dengan dunia empirik, sehingga bisa menjamin hubungan timbal balik saling menguatkan antara mahasiswa dengan masyarakat. Sebagai kegiatan intrakurikuler, KKN menyerupai matakuliah berkredit, yang dibina oleh tim pembekalan, dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, serta dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).

Tugas utama dari tim pembekalan adalah membantu mahasiswa memperoleh seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan kecakapan minimum yang diperlukan bagi setiap mahasiswa peserta KKN untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, dan melaporkan program kerja KKN. Upaya ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan lokakarya. Kegiatan pelatihan dilakukan dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk perencanaan program, sedangkan kegiatan lokakarya dilakukan untuk penentuan skala prioritas dan penetapan program utama dan program kerja pokok dan program kerja pendukung.

Tugas utama dosen pendamping lapangan sebagai berikut: (1) bertindak sebagai anggota unit pengelola KKN selama di lapangan dengan membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan, kecamatan, instansi atau dinas dan masyarakat di lokasi KKN; (2)

mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKN dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN; (3) membina disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi agar program-program KKN terlaksana dengan baik; (4) membantu menciptakan hubungan sosial yang positif antar mahasiswa KKN, dan antara mahasiswa KKN dengan perangkat pemerintahan, instansi terkait dan warga masyarakat secara umum; (5) membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan program kerja KKN; (6) melakukan penilaian dalam rangka evaluasi KKN sebagai matakuliah; (7) menyusun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk kelanjutan program; dan (8) bertanggung jawab kepada pimpinan universitas melalui Ketua LPM.

2. Model Pengembangan Program Kerja KKN

Setelah cukup lama dilaksanakan oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia, saat ini dikenal terdapat banyak model KKN. Misalnya, KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) seperti yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjahmada di Yogyakarta, atau KKN yang biasa diselenggarakan oleh beberapa LPTK, yaitu KKN dan Praktik Pengalaman Lapangan Terpadu. Model atau pola-pola tersebut pada dasarnya dikembangkan berdasarkan tujuan dan karakteristik dari perguruan tinggi masing-masing.

Sebuah model baru yang diusulkan untuk dapat dikembangkan dan diterapkan berdasar pada studi pendidikan luar sekolah adalah KKN-PPPM (Pelayanan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat). Untuk itu, setiap kelompok kerja mahasiswa KKN bisa memilih dan menyelenggarakan berbagai program kerja yang dikelompokkan menjadi tiga jenis program, yaitu: (1) program pendidikan masyarakat (*community education*), (2) program pelayanan masyarakat (*community service*), dan (3) program pengembangan masyarakat (*community development*).

Mempertimbangkan waktu pelaksanaan KKN yang singkat, maka jenis program pengembangan masyarakat tidak dilaksanakan tersendiri oleh mahasiswa, melainkan dijadikan program payung oleh LPM dan disinergikan dengan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen. Karena itu, sajian singkat ini memusatkan perhatian pada jenis program KKN untuk pemberdayaan keluarga

dan masyarakat, melalui kegiatan pendidikan dan pelayanan masyarakat.

3. Program Pendidikan Masyarakat

a. Konsep dan Tipologi

Berdasarkan hasil pengumpulan dan telaah data, bisa dirumuskan permasalahan atau kebutuhan, yaitu: kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Selanjutnya, seorang pengembang program bisa mengajukan pertanyaan, apakah permasalahan tersebut berkenaan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan warga masyarakat, atau kelompok sasaran. Bila penyelesaian masalah tersebut berhubungan langsung, atau mensyaratkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis program yang paling relevan adalah program pendidikan masyarakat.

Faktor	Tipe Program		
	Pengembangan	Kelembagaan	Penerangan
Tujuan utama	Mendefinisikan dan memecahkan masalah-masalah individu, kelompok ataupun komunitas.	Pertumbuhan dan perbaikan kemampuan dasar, ketrampilan, pengetahuan, kompetensi individual.	Pertukaran informasi
Sumber Tujuan	Dikembangkan terutama dari kebutuhan atau masalah khalayak sasaran.	Dikembangkan terutama dari disiplin ataupun bidang ilmu atau dari pihak pendidik.	Diperoleh dari informasi baru hasil penelitian, undang-undang dan peraturan baru.
Penggunaan ilmu dan teknologi	Pengetahuan digunakan untuk membantu pemecahan masalah.	Penguasaan ilmu dan teknologi jadi fokus. Program diarahkan pada bagaimana mencapai tujuan ini.	Informasi ditransfer kepada khalayak sasaran untuk segera diketahui dan digunakan.
Pilihan khalayak sasaran	Terlibat dalam penentuan masalah atau kebutuhan dan ruang lingkup serta sifat program.	Terlibat dalam implementasi pelatihan.	Terlibat terutama sebagai penerima informasi.
Peran Programmer	Memperlancar seluruh proses kependidikan dan	Mendiseminasikan ilmu dan teknologi melalui proses	Memberikan jawaban akan kebutuhan infor-

	pelatihan, sejak identifikasi kebutuhan sampai evaluasi program.	instruksional.	masi baru.
Standar Keefektifan	Ditentukan oleh kualitas solusi masalah dan intensitas penguasaan ketrampilan pemecahan masalah oleh individu, kelompok dan komunitas.	Ditentukan oleh sampai sebaik mana khalayak sasaran menguasai pengetahuan atau kompetensi yang diinginkan.	Ditentukan oleh jumlah orang yang terjangkau, dan berapa banyak informasi yang terdistribusikan.

Bagan 1: Tipologi Program Pendidikan dan Pelatihan

Secara sederhana, pendidikan masyarakat adalah segala bentuk kegiatan pembelajaran di luar sistem persekolahan, yang terorganisasi, disengaja dan direncanakan untuk membantu masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup mereka (Rogers, 1993). Karena itu, kegiatan semacam kursus, penataran, pelatihan, penyuluhan, dan belajar kelompok merupakan sebagian ragam program pendidikan masyarakat.

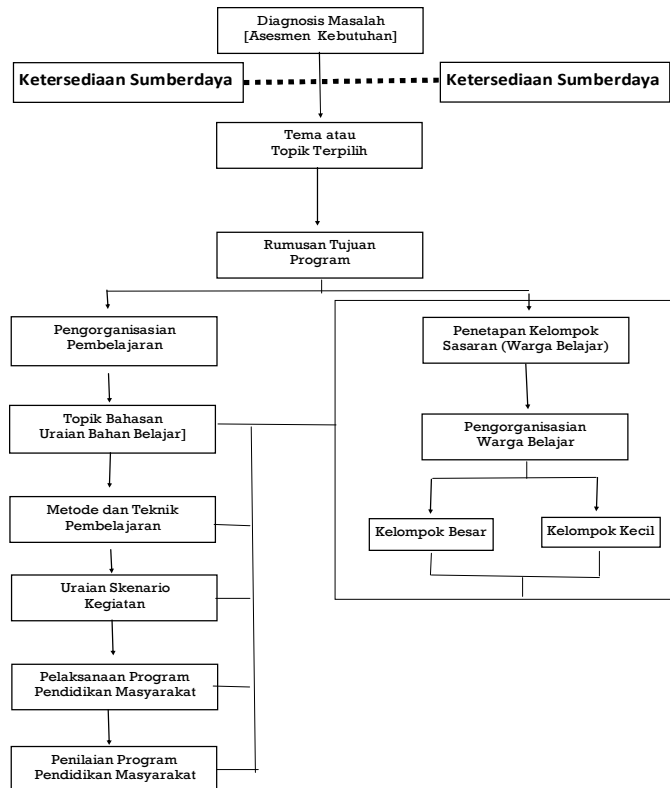
Jenis-jenis program pendidikan masyarakat bisa diperjelas dengan menggunakan tipologi program menurut Boyle (1981:7). Ada tiga tipe program yaitu (1) program pengembangan (*developmental*), (2) program kelembagaan (*institutional*), dan (3) program penerangan (*informational*).

Program pengembangan melibatkan khalayak sasaran dalam penentuan masalah atau kebutuhan dan ruang lingkup serta sifat program. Peranan programer adalah memperlancar seluruh proses kependidikan dan pelatihan, sejak dari pengenalan kebutuhan sampai evaluasi hasil dan program. Program kelembagaan melibatkan khalayak sasaran dalam pelaksanaan pelatihan. Sedangkan peranan programer menyebarkan ilmu dan teknologi melalui proses instruksional. Program penerangan melibatkan khalayak sasaran terutama sebagai penerima informasi. Peranan programer adalah memberikan jawaban terhadap permintaan informasi.

Berdasarkan tipologi program pendidikan dan pelatihan tersebut, bisa dipilih apakah akan mengembangkan jenis program pengembangan, kelembagaan, maupun penerangan.

b. Pengembangan Program Pendidikan Masyarakat

Sejalan kaidah kemandirian, maka masalah atau kebutuhan yang paling layak atau mungkin untuk dijadikan program terpilih adalah yang disertai dengan ketersediaan sumber daya, baik manusia, prasarana dan sarana, maupun dana program. Sejalan dengan peran mahasiswa KKN sebagai duta pembangunan, yang mencakup peran katalisator, pembantu proses, pemberi solusi, dan penghubung sumber (*catalyst, process helper, solution giver, and sources linker*), maka apabila ternyata tidak tersedia sumber daya, mahasiswa berperan sebagai penghubung sumber belajar, sehingga dimungkinkan terjadinya pertemuan antara kebutuhan belajar dengan sumber belajar.



Bagan 2: Pengembangan Program Pendidikan Masyarakat

Berbagai metode pembelajaran bisa diterapkan dalam program pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemilihan atas salah satu atau lebih metode harus didasarkan pada ranah utama yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Berikut diuraikan secara ringkas langkah-langkah perancangan program pendidikan masyarakat.

Pertama, identifikasi masalah. Sebelum program dilaksanakan perlu dipahami terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara tepat. Masalah di sini dapat diartikan sebagai keadaan, fakta, kejadian yang memberikan gambaran kepada kita sebagai sesuatu yang belum sesuai dengan yang kita harapkan, baik dari segi norma-norma keilmuan, maupun dari segi norma-norma hukum yang berlaku.

Kedua, cara mengidentifikasi masalah. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut, pengamatan, wawancara, telaah dokumen, angket, analisis masalah kelompok, analisis jabatan, dan bahkan uji kecakapan atau pengetahuan. Sesuai dengan peran kelompok mahasiswa KKN, maka khalayak sasarannya adalah keluarga dan masyarakat, khususnya yang kurang beruntung atau belum berkembang, sedangkan masalah-masalah yang akan dipilih sebagai titik tolak program adalah masalah kehidupan sehari-hari. Karena itu, teknik yang paling mudah digunakan adalah teknik pengamatan, wawancara dan telaah dokumen.

Ketiga, merumuskan topik pembelajaran dialogis. Setelah berbagai masalah dikenali, maka perlu diadakan penggolongan menurut jenisnya. Misalnya: banyak warga terjangkit penyakit kulit, penggunaan air mandi dan minum tidak sehat, cara berbudu tidak sesuai syarat kesehatan, udara sangat berdebu, makanan dibiarkan tak tertutup, serta tumpukan sampah di sembarang tempat. Gejala-gejala masalah tersebut, dapat dicakup dalam topik penyakit menular dan penyebarannya. Kelompok masalah ini bisa diupayakan pemecahannya melalui topik tersebut dan dilakukan dengan metode pembelajaran dialogis. Topik penyakit menular dan penyebarannya memang agak luas, tetapi dengan begitu justru bisa menampung permasalahan yang telah ditemukan. Dengan topik diperluas seperti ini, dialog dapat diperkaya, bersifat lentur, dan menarik warga belajar, sehingga dialog bisa lebih hidup dan tidak kekurangan bahan.

Keempat, merumuskan tujuan. Tujuan perlu dirumuskan dengan jelas agar dialog tepat mengenai sasaran dan pesan-pesan dialog dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran akan masalah, serta memperbaiki tindakan-tindakan warga masyarakat lebih lanjut.

Kelima, menguraikan bahan dalam bentuk pokok-pokok bahasan. Berdasarkan tujuan khusus pada langkah 3 dapat dirumuskan pokok bahasan sebagai berikut: (a) macam-macam penyakit menular; (b) sebab-sebab terjadinya penularan; (c) media penularan (udara, air, makanan, kontak langsung); (d) tindakan-tindakan sering terjadi yang menimbulkan penularan (contoh kongkrit di lingkungan mereka); dan (e) cara-cara menghindari penularan penyakit.

Keenam, menetapkan kelompok sasaran (*target group*), setelah pokok-pokok bahasan diketahui, maka perlu ditetapkan siapa saja yang hendak dipengaruhi tindakannya sebagai warga belajar atau binaan. Proses selanjutnya berupa pengorganisasian dengan cara, misalnya: (a) memohon ijin kepada pemerintah setempat dengan mengemukakan gagasan yang akan dilakukan; (b) jika pemerintah setempat dapat menerima gagasan yang diajukan, maka dapat diusulkan hal-hal yang akan dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah mengadakan rapat-rapat kelompok kecil, menggunakan wadah organisasi atau kelompok kecil yang sudah ada di desa, tetapi juga bisa mempubli-kasikan poster-poster atau pamflet dan sebagainya untuk sasaran masal atau kelompok besar.

Ketujuh, menentukan teknik dialog. Penentuan teknik dialog dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta ukuran kecil atau besarnya kelompok sasaran. Sebagai contoh, setelah mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dipilihlah teknik "mimbar wawancara". Alasannya antara lain karena kelompoknya cukup besar, serta agar pesan yang hendak disampaikan lebih terarah dan menjangkau seluruh khalayak sasaran.

Kedelapan, pengembangan skenario. Misalnya, mimbar wawancara diadakan di balai desa, yang memuat sekitar 50 orang sebagai peserta atau pendengar resmi, ditambah dengan yang tidak resmi di luar balai desa, atau bila penduduk sekitar ingin menonton. Karena itu diperlukan penguat suara. Pelaku-pelakunya adalah kelompok maha-siswa KKN yang terdiri dari empat mahasiswa. Salah seorang maha-siswa menjadi pewawancara dan lainnya yang diwawancarai. Keempat-nya menyiapkan ruang yang ditata agar sesuai dengan metode dialog interaktif.

Kesembilan, pelaksanaan. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik maka perlu ditempuh langkah-langkah: (1) menyiapkan ruangan sebaik mungkin sehingga pengunjung dapat mengikuti wawancara dengan baik; (2) menyediakan penguat suara, terutama jika pengun-

jung melimpah; (3) perlu latihan terlebih dahulu supaya lebih meyakinkan dan enak diikuti; (4) mempersiapkan atraksi-atraksi selingan dengan permainan, teka-teki, musik dan sebagainya; (5) mengendalikan penggunaan waktu agar tidak terlalu lama, misalnya paling lama 120 menit dan dilakukan penyesuaian berdasarkan suasana acara dan hadirin; dan (6) jika memang harus meminta bantuan dari narasumber ahli, harus ada jaminan bahwa narasumber tersebut benar-benar ahli dan memastikan bisa hadir.

Kesepuluh, penilaian program. Untuk mengetahui kelayakan proses maupun hasil program, perlu diadakan dilakukan penilaian pada para peserta, misalnya dengan: (a) wawancara tentang penguasaan bahan; dan (b) wawancara balikan tentang proses dan kegunaan program tersebut.

4. Program Pelayanan Masyarakat

a. Konsep dan Tipologi

Terlebih dulu harus ditegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan akademik dan atau profesional. Setiap mahasiswa peserta KKN juga harus dilihat sebagai calon akademisi atau tenaga profesional. Karena itu, konsep pelayanan masyarakat dalam program KKN juga harus dipahami dalam batasan pelayanan "akademik" dan atau "profesional". Memang tidak terdapat larangan bila bersama-sama warga masyarakat, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan kerja yang bersifat fisik. Namun, bila porsi terbesar dari kegiatan adalah kerja fisik, maka program KKN menjadi kehilangan hakikat dan menyimpang dari tujuan utamanya.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pelayanan masyarakat yang sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi, yaitu: layanan keahlian, layanan profesional, layanan konsultatif, layanan asistensial, dan layanan advokasional. Mahasiswa peserta KKN jurusan teknik, misalnya, secara minimum sudah mampu memberikan layanan keahlian dalam bidang masing-masing, seperti konstruksi bangunan, jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun lembaga di desa KKN.

Mahasiswa kedokteran, kesehatan, dan keperawatan, bisa memberikan layanan profesional sesuai bidang keahlian yang sedang ditekuni. Tentu saja, dalam pelaksanaan, kegiatan ini harus disupervisi oleh tenaga profesional kedokteran, ataupun kesehatan masyarakat. Dengan dibantu dan disupervisi oleh tenaga ahli, mahasiswa psikologi

dan mungkin pendidikan bisa memberikan layanan konsultasi psikologik, bimbingan dan konseling pendidikan. Secara umum, hampir semua mahasiswa bisa melakukan layanan asistensial dalam administrasi pemerintahan desa KKN. Sejauh tidak menyangkut kasus persengketaan dan konflik sosial politik, mahasiswa fakultas hukum bisa memberikan layanan advokasional bagi warga masyarakat yang membutuhkan.

b. Pengembangan Program Pelayanan Masyarakat

Dalam identifikasi masalah, seluruh permasalahan yang telah ditemukan mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing selama observasi pendahuluan, dituliskan dalam lembar rekapitulasi yang telah dipersiapkan. Apabila mahasiswa dari disiplin bidang tertentu menemukan masalah untuk disiplin bidang lain, maka hal tersebut dapat direkomendasikan kepada rekan mahasiswa dari bidang yang sesuai dalam satu subunit atau unit yang sama. Permasalahan yang telah ditemukan dituliskan dalam lembar Identifikasi Permasalahan, dirinci menurut lokasi ditemukannya masalah dan nara sumbernya, bisa satu narasumber atau lebih.

Pada langkah prioritas masalah, mahasiswa memilih permasalahan yang diprioritaskan untuk dijadikan calon program selama masa KKN. Penentuan skala prioritas program didasarkan atas urgensi, keterjangkauan sesuai dengan analisis Sumber Daya Kuwat (Kesempatan, Uang, Waktu, Alat, dan Tenaga), serta diberi uraian alasan yang mendasari pemilihannya untuk ditangani sebagai program KKN. Berdasarkan analisis Sumber Daya Kuwat, yang memungkinkan diangkat sebagai program KKN.

Rencana Program Kerja KKN yang akan dilaksanakan, dikembangkan dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipilih, dan dituliskan dalam lembar rencana program. Rencana program ini khusus untuk program utama, yaitu yang sesuai dengan bidangnya dan program pendukung, yaitu apabila tidak sesuai dengan bidangnya.

Usulan rencana Program Kerja KKN dibahas dalam loka-karya untuk penajaman dan persetujuan dari LPM dan dosen pembimbing lapangan. Persetujuan program kerja disesuaikan dengan program payung yang dikembangkan oleh LPM. Dokumen program kerja KKN juga dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan LPM dan universitas bila memerlukan bantuan atau dukungan khusus.

Penilaian program kerja KKN dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan dan kemanfaatan program yang telah dilaksanakan oleh

mahasiswa. Secara komulatif dan komposit, hasil penilaian ini menjadi dasar bagi penilaian program KKN yang dikelola oleh LPPM.

C. SIMPULAN

Dalam jenis program pengembangan masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), juga bisa dilaksanakan dalam bentuk program pendidikan dan/atau pelayanan masyarakat. Perbedaannya, dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dimungkinkan untuk disertakan program-program pemberian sumber dana dan sumber daya lain, baik sebagai modal utama maupun sebagai rangsangan. Tentu saja, pola pemberian bantuan demikian lebih mungkin dilakukan oleh pemerintah atau lembaga donasi lain, dan tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan KKN.

Sebuah desain program pendidikan masyarakat, sekurang-kurangnya mencakup langkah dan hasil kegiatan berikut: (1) diagnosis masalah atau asesmen kebutuhan; (2) tema atau topik terpilih; (3) rumusan tujuan program; (4) pengorganisasian pembelajaran yang mencakup penetapan pokok bahasan dan uraian bahan belajar, metode dan teknik pembelajaran, uraian skenario kegiatan, pelaksanaan program pendidikan masyarakat, dan penilaian program pendidikan masyarakat; (5) penetapan kelompok sasaran atau warga belajar; dan (6) pengorganisasian warga belajar, dalam kelompok kecil atau kelompok besar.

Pengembangan program pelayanan masyarakat oleh mahasiswa KKN pada dasarnya mengikuti pola pengembangan program secara umum, yaitu: (1) identifikasi masalah; (2) prioritas masalah; (3) rencana program; (4) pelaksanaan program; dan (5) penilaian program.

DAFTAR RUJUKAN

- Apps, JW. 1979. *Problems in Continuing Education*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Boyle, P.G. 1981. *Planning Better Programs*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Rogers, Alan. 1993. *Adult Learning for Development*. Cassel Educational Limited. Villiers House 41/47 Strand London.
- Rosidi, Sakban, dkk. 2015. *Bahan Pedamping Pembekalan dan Lokakarya Kuliah Kerja Nyata, Universitas Islam Majapahit, 31 Juli -2 Agustus 2015* (makalah).